



KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN KEUANGAN

**SEMESTER I TAHUN 2026
UNTUK PERIODE BERAKHIR 30 JUNI 2026**

SMK KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA

 [smkhutnegeri.smd](https://www.instagram.com/smkhutnegeri.smd)

 [Smkkn Samarinda](https://www.facebook.com/SmkknSamarinda)

 smkkn.samarinda@kehutanan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 satuan kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda dapat kami selesaikan tepat waktu. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Kehutanan merupakan salah satu Kementerian yang mengalami pemisahan, dari Bagian Anggaran (BA) 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Bagian Anggaran (BA) 143 Kementerian Kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. UPT sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 30 Juni 2026

Kepala Sekolah,



Mukhammad Ari Hidayanto, S.Hut., M.Ling.

NIP 19830202 200912 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	5
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	5
2. NERACA.....	5
3. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
II. NERACA	8
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	10
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. DASAR HUKUM.....	13
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA	14
A.3. KEGIATAN/ISU STRATEGIS PADA SMKKN SAMARINDA.....	17
A.4 CAPAIAN KINERJA PELAKSNAAN PROGRAM PRIORITAS (PN)	18
A.5 PENDEKATAN PENYUSUNAN PADA SMKKN SAMARINDA	21
A.6 BASIS AKUNTANSI.....	21
A.7 DASAR PENGUKURAN	21
A.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI	22
A.9 KEWAJIBAN	26
A.10 EKUITAS	26
A.11 KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025	26
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	27
B.1 Pendapatan	28
B.2 Belanja.....	29
B.2.1 Belanja Pegawai.....	35
B.2.2 Belanja Barang	36
B.2.3 Belanja Modal.....	38
B.2.4 Belanja Modal Pealatan dan Mesin	39
B.2.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	40
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	40
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	40
C.2 Piutang Bukan Pajak	36
C.3 Piutang Bukan Pajak (Netto)	36
C.4 Persediaan	37

C.5 Tanah.....	37
C.6 Peralatan dan Mesin.....	37
C.7 Gedung dan Bangunan.....	38
C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	44
C.9 Aset Tetap Lainnya	39
C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan	39
C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	39
C.12 Aset Tak Berwujud	39
C.13 Aset Lain-Lain.....	40
C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	40
C.15 Kewajiban Jangka Pendek	41
C.15.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	41
C.15.2 Utang Yang Belum Ditagihkan.....	41
C.15.3 Uang Muka dari KPPN	41
C.16 Ekuitas.....	41
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	41
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	41
D.2 Beban Pegawai	42
D.3 Beban Persediaan	45
D.4 Beban Barang dan Jasa	45
D.5 Beban Pemeliharaan	47
D.6 Beban Perjalanan Dinas	48
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	49
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	50
D.9 Kegiatan Non Operasional.....	50
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	51
E.1 Ekuitas Awal	51
E.2 Surplus (Defisit) LO.....	51
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	51
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset.....	51
E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan.....	51
E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	51
E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	52
E.3.5 Koreksi Lain-lain	52
E.4 Transaksi Antar Entitas	52
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	52
E.5 Ekuitas Akhir	52
F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	52
F.1 PENGUNGKAPAN DAMPAK PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH DAN KEBERLANJUTAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN	52



KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
SAMARINDA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 30 Juni 2026

Kepala Sekolah

Mukhammad An Hidayanto, S.Hut., M.Ling.

NIP 19830202 200912 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan 30 Juni 2026 secara ringkas disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran 30 Juni 2026			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	30 Juni 2025
Pendapatan Negara				
1. Pendapatan PNB				
Pendapatan PNB	28,704,000.00	106,431,825.00	371	16,570,248.00
Lainnya				
Jumlah Pendapatan	28,704,000.00	106,431,825.00	371	16,570,248.00
Belanja Negara				
1. Belanja Pegawai	6,032,263,000.00	3,517,257,482.00	58	2,860,083,476.00
2. Belanja Barang	13,611,717,000.00	5,380,699,196.00	40	3,822,327,229.00
3. Belanja Modal	987,573,000.00	987,364,797.00	100	0.00
Jumlah Belanja	20,631,553,000.00	9,885,321,475.00	48	6,682,410,705.00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025 secara ringkas disajikan sebagai berikut :

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Aset		
Aset Lancar	187,808,367.00	1,067,673.00
Aset Tetap	44,543,598,231.00	43,556,233,434.00
Aset Lainnya	0.00	491,848,871.00
Total Aset	44,731,406,598.00	44,049,149,978.00
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	492,729,174.00	54,933,066.00
Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
Total Kewajiban	492,729,174.00	54,933,066.00
Ekuitas	44,238.677.424.00	43,994,216,912.00
Total Kewajiban dan Ekuitas	44,731,406,598.00	44,049,149,978.00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, secara ringkas disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	Pendapatan Operasional	32,618,676.00	16,744,000,00
2	Beban Operasional	9,154,335,286.00	8,346,150,340,00
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(9,121,716,610.00)	(8,329,406,340,00)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(412,712,528.00)	2,136,533,00
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	(9,534,429,138.00)	(8,327,269,807,00)
6	Surplus/(Defisit) LO	(9,534,429,138,00)	(8,327,269,807,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 secara ringkas disajikan sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	43,994,216,912,00	0,00
Surplus/Defisit LO	(9,534,429,138.00)	(8,327,269,807,00)
Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	0.00	0,00
Transaksi Antar Entitas	9,778,889,650.00	52,515,461,168,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	244,460,512.00	44,188,191,361,00
Ekuitas Akhir	44,238,677,424,00	44,188,191,361,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA SMK KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026			30 Juni 2025
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
PNBP	B.1.1	28.704.000,00	106.431.825,00	371	16.570.248,00
Jumlah Pendapatan		28.704.000,00	106.431.825,00	371	16.570.248,00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6.032.263.000,00	3.517.257.482,00	58	2.860.083.476,00
Belanja Barang	B.2.2	13.611.717.000,00	5.380.699.196,00	40	3.822.327.229,00
Belanja Modal	B.2.3	987.573.000,00	987.364.797,00	100	0,00
Jumlah Belanja		20.631.553.000,00	9.885.321.475,00	48	6.682/410.705,00

Samarinda, 30 Juni 2026

Kepala Sekolah

Mukhammad Ari Hidayanto, S.Hut., M.Ling.

NIP 19830202 200912 1 003

II. NERACA

SATUAN KERJA SMK KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA
LAPORAN NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	180.000.000,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	898.673,00	898.673,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	5.323.194,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	0,00	0,00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.1.7	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.8	5.323.194,00	0,00
Persediaan	C.1.9	1.586.500,00	169.000,00
JUMLAH ASET LANCAR		187.808.367,00	1.067.673,00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	14.140.010.789,00	13.152.645.992,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	48.815.394.746,00	48.815.394.746,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	50.402.000,00	50.402.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	822.851.036,00	822.851.036,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(19.285.060.340,00)	(19.285.060.340,00)
JUMLAH ASET TETAP		44.543.598.231,00	43.556.233.434,00
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	0,00	0,00
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		0,00	0,00

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	0,00	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaanya	C.4.2	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.4.3	0,00	1.001.702.479,00
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	0,00	(509.853.608,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	491.848.871,00
JUMLAH ASET		44.731.406.598,00	44.049.149.978,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	279.129.174,00	54.933.066,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2	33.600.000,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	180.000.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		492.729.174,00	54.933.066,00
JUMLAH KEWAJIBAN		492.729.174,00	54.933.066,00
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6.1	44.238.677.424,00	43.994.216.912,00
JUMLAH EKUITAS		44.238.677.424,00	43.994.216.912,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		44.731.406.598,00	44.049.149.978,00

Samarinda, 30 Juni 2026

Kepala Sekolah,



Mukhammad Ari Hidayanto, S.Hut., M.Ling.

NIP 19830202 200912 1 003

III. LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA SMK KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	28.704.000,00	16.744.000,00	15.874.676,00	94,808
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		28.704.000,00	16.744.000,00	15.874.676,00	94,808
Jumlah Pendapatan		28.704.000,00	16.744.000,00	15.874.676,00	94,808
BEBAN OPERASIONAL	D.2	0,00	0,00	0,00	
Beban Pegawai	D.2.1	3.714.215.850,00	3.033.650.371,00	680.565.479,00	22.434
Beban Persediaan	D.2.2	117.991.050,00	42.060.500,00	75.930.550,00	180.527
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	4.656.136.763,00	3.465.272.502,00	1.190.864.261,00	34.366
Beban Pemeliharaan	D.2.4	272.456.290,00	370.355.779,00	(97.899.489,00)	(26.434)
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	393.535.333,00	329.055.929,00	64.479.404,00	19.595
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.2.6	0,00	0,00	0,00	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	0,00	1.105.755.259,00	(1.105.755.259,00)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		9.154.335.286,00	8.346.150.340,00	808.184.946,00	9.683
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.121.716.610,00)	(8.329.406.340,00)	(792.310.270,00)	9.512
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET		(483.742.171,00)	0,00	(483.742.171,00)	0
Pendapatan Pelepasan Aset	D.3.1	8.106.700,00	0,00	8.106.700,00	-
Beban Pelepasan Aset	D.3.2	491.848.871,00	0,00	491.848.871,00	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		71.029.643,00	2.136.533,00	68.893.110,00	3.224.528
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	71.029.643,00	2.136.533,00	68.893.110,00	3.224,528

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	JUMLAH	%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.4	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(412.712.528,00)	2.136.533,00	(414.849.061,00)	(19.416.927)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.534.429.138,00)	(8.327.269.807,00)	(1.207.159.331,00)	14.496
POS LUAR BIASA	D.4	0,00			
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	-
POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	-
SURPLUS / (DEFISIT) – LO		(9.534.429.138,00)	(8.327.269.807,00)	(1.207.159.331,00)	14.496

Samarinda, 30 Juni 2026

Kepala Sekolah



Mukhamad Ari Hidayanto, S.Hut., M.Ling.

NIP 19830202 200912 1 003

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA SMK KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA
LAPORAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	%
		30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	JUMLAH	
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.1	43.994.216.912,00	0,00	43.994.216.912,00	0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS					
Koreksi Nilai Persediaan	E.2	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Atas Reklasifikasi	E3	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4	0,00	0,00	0,00	
LAIN-LAIN	E.5	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.6	(9.534.429.138,00)	(8.327.269.807,00)	(107.159.331,00)	14.5
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	9.778.889.650,00	52.515.461.168,00	(42.736.571.518,00)	(81,38)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.8	244.460.512,00	44.188.191.361,00	(43.943.730.849,00)	(99.45)
EKUITAS AKHIR	E.9	44.238.677.424,00	44.188.191.361,00	50.486.063,00	0.11

Samarinda, 30 Juni 2026

Kepala Sekolah,



Mukhamad Ari Hidayanto, S.Hut., M.Ling.
NIP 19830202 200912 1 003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas

- PMK Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA

Profil Dan
Kebijakan
Teknis
Satuan Kerja
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Kehutanan
Negeri
Samarinda

Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 mempunyai Visi "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*" dan rumusan Visi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029 adalah "*Entitas Tapak Hutan yang mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*".

Yang dimaksud Sasaran Ekologi adalah Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Sasaran Ekonomi adalah meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan. Sasaran Sosial adalah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Mengacu pada Visi Pembangunan Kehutanan Badan P2SDM mempunyai Visi untuk 2025-2029 yaitu "*Penguatan Kompetensi SDM Kehutanan dan Peran Serta Masyarakat di bidang kehutanan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing, responsif, dan adaptif terhadap perubahan dalam mencapai ekonomi hijau dan produktivitas berkelanjutan.*"

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda merupakan unit/perangkat organisasi pada Kementerian Kehutanan yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan SDM yang utamanya melalui Pendidikan menengah kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yaitu, melaksanakan fasilitas penyusunan rencana Pendidikan menengah kejuruan kehutanan; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan Tingkat pertama atau sederajat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 9 Tahun 2025, tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat. Adapun fungsinya sebagaimana berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program Pendidikan pengajaran;
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- c. Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan pengajaran;
- d. Pengelolaan program pengabdian alumni dan data alumni SMKKN;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan Masyarakat dan pengelolaan data dan informasi.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan selaras dengan tujuan organisasi, struktur organisasi dirancang sebagai wadah yang memfasilitasi pembagian, koordinasi, dan pelaksanaan setiap tugas dengan penegasan peran, kewenangan, serta tanggung jawab pada unit-unit kerja yang relevan sesuai bidangnya, sehingga mandat institusi dapat diimplementasikan secara sistematis, terarah, dan terukur melalui mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.

Bagan susunan organisasi dan tata kerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebagaimana pada began berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan P2SDM

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SMK Kehutanan Negeri Samarinda mempunyai satua-satuan organisasi yang diatur sebagai berikut:

- a. SMK Kehutanan Negeri Samarinda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Peyuluhan dan Pengembangan SDM;
- b. SMK Kehutanan Negeri Samarinda dipimpin oleh Kepala Sekolah;
- c. Susunan organisasi SMKKN terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan
 - b) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksa

Visi dan Misi SMK Kehutanan Negeri Samarinda untuk 2025-2029 mengacu pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*" serta rumusan Visi Kementerian Kehutanan yaitu menjadikan hutan sebagai "*Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*". Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menghasilkan Tenaga Teknis Menengah di bidang Kehutanan, guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang baik hal ini harus di sertakan dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan mutu pendidikan yang baik dimana hal ini juga didukung oleh laporan keuangan sebagai tanggung jawab dalam penggunaan anggaran baik yang berasal dari pemerintah atau non pemerintah dan diimplementasi dalam akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Berdasarkan rumusan tersebut, visi SMK Kehutanan Negeri Samarinda adalah **"Terwujudnya SMK Kehutanan yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global"**.

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi SMK Kehutanan Negeri Samarinda disusun dengan berdasarkan tugas dan fungsinya, misi SMK Kehutanan Negeri Samarinda adalah:

1. Menjadi Pendidikan menengah kejuruan kehutanan yang bersinergi erat dengan DUDIKA
2. Mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat dengan platform digital
3. Menumbuhkan karakter kepemimpinan dan inovasi sosial
4. Merintis kolaborasi internasional guna mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, siap kerja serta mampu bersaing di Tingkat nasional maupun global

Tujuan dari penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda mengacu pada visi dan misi sekolah sebagai berikut :

- a. Menghasilkan lulusan yang :
 1. memiliki karakter beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;
 2. memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan;
 3. menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
 4. memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja atau berwirausaha; dan
 5. berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global.
- b. Mengembangkan standar isi SMK Kehutanan Negeri Samarinda mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- c. Memenuhi Standar Proses dengan cara mengembangkan:
 1. Proses Pembelajaran di Kelas yang menyenangkan dengan mengacu pada Kurikulum Merdeka
 2. Pembelajaran Praktik;
 3. Pembelajaran Sistem Blok; dan
 4. Pembelajaran pada Pendidikan Sistem Ganda.
- d. Menyelenggarakan Penilaian Peserta Didik

Penilaian pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda dilaksanakan berdasarkan penilaian berbasis kompetensi, yang merupakan penilaian berbasis standar dan kriteria yang mampu telusur, dan bersifat partisipatif dari peserta didik. Penilaian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh informasi yang valid tentang efektivitas proses pembelajaran dan tingkat pencapaian hasil belajar. Penilaian Pendidikan terdiri atas Penilaian Hasil

Belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah Pusat.

e. Meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru SMK/MAK harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi guru pada umumnya mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kompetensi keahlian di bidang kejuruan yang merupakan kompetensi profesional, dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Meningkatkan standar sarana dan prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

g. Meningkatkan Standar Pengelolaan SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang memuat sepuluh komponen yaitu (1) Penguatan Visi, Misi, dan Tujuan, (2) Pembuatan Rencana Kerja Jangka Menengah, (3) Pembuatan Rencana Kerja Tahunan, (4) Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan, (5) Budaya, (6) Pelaksanaan, (7) Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Internal, (8) Pengawasan, (9) Akuntabilitas, dan (10) Sistem Informasi Manajemen.

h. belajar mengajar teori dan praktikum, daya, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, biaya lembur, biaya transportasi, pajak, biaya asuransi, biaya kegiatan pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, biaya praktik kerja/magang industri, biaya bengkel kerja berbasis industri, serta biaya perencanaan dan pelaporan.

Mengelola biaya operasional yang efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran. Biaya pendidikan meliputi biaya personal, biaya investasi, dan Biaya Operasi. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya Investasi SMK/MAK adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap. Komponen Biaya Operasi meliputi Biaya Operasi personalia dan Biaya Operasi nonpersonalia. Komponen Biaya Operasi personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Komponen Biaya Operasi nonpersonalia meliputi biaya pengadaan alat tulis, bahan dan alat habis pakai kegiatan

A.3 KEGIATAN/ISU STRATEGIS SMK KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA TAHUN 2025

A.3.1. Isu Strategis

*Kegiatan/Isu
Strategis*

Sektor kehutanan Indonesia menghadapi isu-isu strategis yang kompleks. Tantangan utama seperti laju deforestasi, konflik tenurial, perubahan iklim, dan penegakan hukum yang belum optimal memerlukan pendekatan pengelolaan hutan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management) menuntut pendekatan inovatif, didorong oleh kemajuan teknologi digital dan tuntutan global akan kelestarian lingkungan. Isu peningkatan kompetensi SDM kehutanan juga menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Keberhasilan pembangunan kehutanan Indonesia di masa depan sangat bertumpu pada kekuatan dan kapasitas SDM di dalamnya. Pengembangan kompetensi SDM kehutanan bukan lagi sekadar supporting system, melainkan sebagai core system dalam pembangunan kehutanan. Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pihak swasta melalui program vokasi dan uji kompetensi yang relevan sangat diperlukan untuk mencetak SDM unggul yang siap menghadapi kompleksitas tantangan aktual dan menuju masa depan kehutanan Indonesia yang lestari menuju Forestry Human Excellence.

Berdasarkan rencana strategis dan perkembangan terbaru, berikut Adalah isu strategis SMK Kehutanan :

- a. Peningkatan kualitas dan relevansi lulusan
- b. Adaptasi revolusi industri 4.0 dan paradigma baru
- c. Penyelarasan kurikulum dengan industri
- d. Optimalisasi sarana dan pengembangan SMK unggulan
- e. Penguatan Pendidikan berbasis karakter dan lingkungan

A.3.2 Rencana Strategis

*Rencana
Strategis*

Penyelenggaraan Pendidikan SMK Kehutanan Negeri bertujuan untuk menyediakan tenaga teknis menengah kehutanan yang sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, responsive, demokratis dan menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di lapangan dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan untuk kesejahteraan Masyarakat serta memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, lulusan SMK Kehutanan diberikan materi pembelajaran di kelas, praktek lapang dan magang sedemikian rupa sehingga memiliki kompetensi dan daya saing agar siap mengisi kebutuhan tenaga kerja di tingkat tapak khususnya pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pada tahun 2025 SMK Kehutanan Negeri Samarinda telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Berdasarkan dokumen tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya, SMK Kehutanan Negeri Samarinda mendukung Kegiatan BP2SDM dalam memenuhi jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja kehutanan serta Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan. Target lulusan pada Renstra SMK

Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1. Target Renstra SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Menciptakan Usulan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang siap bekerja di bidang kehutanan	1.1 Jumlah Lulusan SMKKN yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja kehutanan	97 orang	104 orang	101 orang	108 orang	108 orang	518 orang
		1.2 Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan	30%	35%	40%	45%	50%	

A.4 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN CAPAIAN KINERJA

A.4.1 Program Prioritas Nasional (PN)

Program Prioritas Nasional (PN)

Pembangunan nasional Indonesia periode 2025–2029 diarahkan melalui visi besar yang dijabarkan ke dalam **Delapan Asta Cita**, yaitu delapan agenda strategis pembangunan yang menjadi pijakan utama dalam membangun Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Delapan Asta Cita mencerminkan semangat transformasi untuk mempercepat kemajuan bangsa dalam berbagai sektor, termasuk sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan penguatan ekonomi hijau.

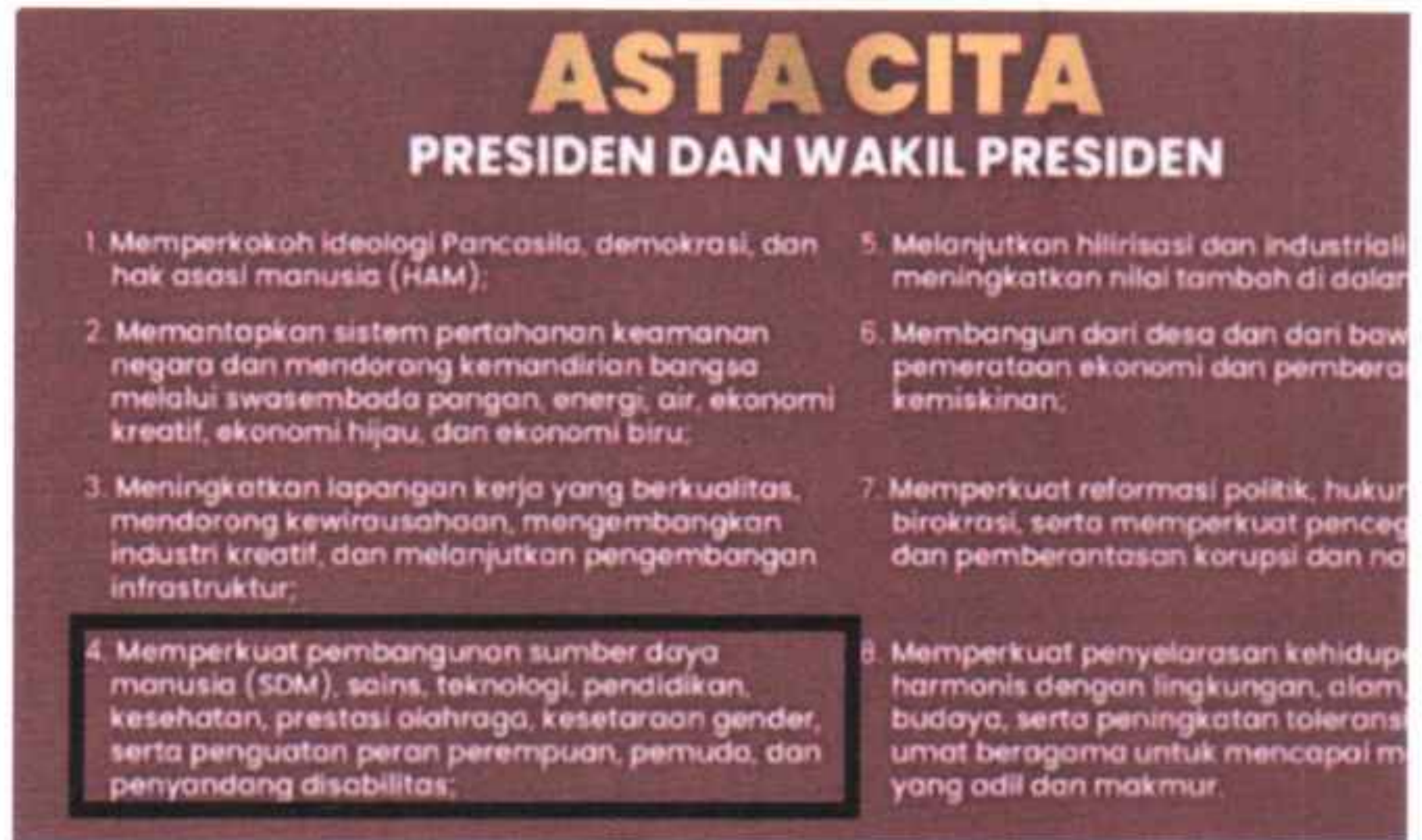
Untuk memastikan implementasi pembangunan berjalan secara sistematis dan terukur, Delapan Asta Cita tersebut dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional (PN) yang menjadi struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Prioritas Nasional disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan satuan kerja pemerintah, termasuk satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Kehutanan.

Dalam konteks ini, SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebagai satuan pendidikan vokasi di bawah Kementerian Kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional, khususnya pada Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi kehutanan, SMKKN Samarinda melaksanakan kegiatan strategis berupa penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan, dengan output utama yaitu tenaga teknis menengah kehutanan yang kompeten dan bersertifikat. Kegiatan ini bertujuan membentuk lulusan yang memiliki keahlian teknis, wawasan lingkungan, serta kesiapan kerja yang tinggi untuk mendukung pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan nasional ke dalam proses pendidikan vokasi, SMKKN Samarinda turut berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan, mendukung ekonomi hijau, serta

memperkuat peran sektor kehutanan dalam pembangunan nasional.



Gambar 2. Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

1. PN 4 : Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Dalam mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional , Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) Samarinda berkontribusi melalui pelaksanaan satu kegiatan strategis, yaitu penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan yang merupakan bagian dari Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk mencetak tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, guna menjawab kebutuhan dunia kerja sektor kehutanan serta memperkuat kapasitas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Para peserta didik dibekali dengan pengetahuan, keterampilan teknis, dan karakter profesional melalui pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, praktik lapangan langsung di kawasan hutan, serta pelaksanaan uji sertifikasi profesi.

Selain menciptakan lulusan yang siap kerja dan bersaing di industri kehutanan, kegiatan ini juga melibatkan tenaga teknis pendidikan yang secara langsung menangani pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi kehutanan dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian, melalui kegiatan ini, SMKKN Samarinda secara nyata

mendukung pencapaian target Prioritas Nasional dalam membangun generasi muda yang unggul, profesional, dan berdaya saing di bidang kehutanan.

A.4.2 Penjelasan Capaian Output Pelaksanaan Prioritas Nasional (PN)

Dalam rangka pelaksanaan program Prioritas Nasional (PN) pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda, output yang telah dicapai sampai dengan periode 30 Juni 2026 melalui 1 kegiatan adalah sebagai berikut :

Alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) ini sebesar Rp12.847.076.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp5.431.349.961,00. Adapun realisasi anggaran maupun keluaran secara rinci sebagaimana berikut:

Tabel 2. Capaian Output Prioritas Nasional I

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Peserta didik SMK bidang kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	12.847.076.000	5.431.349.961	42,28%	Paket	1	1	100,00%
TOTAL	12.847.076.000	5.431.349.961	42,28%	-	1	1	1

A.4.3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SMK Kehutanan Negeri Samarinda dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan Tahun 2026 (Revisi) beserta targetnya sebagaimana table berikut :

Tabel 3 Capaian IKK SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja kehutanan	104 Orang	102 Orang	98,08%
2	Presentase lulusan SMK Kehutanan Negeri yang bekerja di bidang kehutanan	35%	30,15%	86,14%

Target kelulusan peserta didik Tahun Pelajaran 2025/2026 sebanyak 104 peserta didik. Sampai dengan akhir periode pelaporan, jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus sebanyak 102 orang atau mencapai 98,08% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target kelulusan sebesar 100% disebabkan terdapat 2 peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah lulusan yang bekerja diukur berdasarkan jumlah peserta didik yang telah lulus pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026. Dari total 199 peserta didik yang telah lulus pada periode tersebut, sebanyak 60 peserta didik telah bekerja, yang terdiri atas 29

orang dari 97 lulusan Tahun 2025 dan 31 orang dari 102 lulusan Tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sebesar 86,14% yang berarti SMK Kehutanan Negeri Samarinda secara umum telah berhasil mencapai target sesuai perjanjian kinerja Tahun 2026. Pada Tahun 2026 persentase lulusan SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang bekerja di bidang kehutanan sebanyak 30,15% dari target yang tercantum dalam perjanjian kinerja sebesar 35%. Pencapaian ini merupakan pencapaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan yang baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025.

Dalam rangka mencapai target yang tertuang di Perjanjian Kinerja tersebut, perlu adanya Dukungan Manajemen yang menjamin proses internal berjalan dengan baik sehingga SMK Kehutanan Negeri Samarinda menjadi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang mampu terus belajar dan berkembang. Dukungan Manajemen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 (revisi) sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4 Capaian IKK per 30 Juni 2026

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Membangun pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kjeutanan yang inovatif dan berdaya saing	Jumlah lulusan SMKKN yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja kehutanan	104 Orang
2			Presentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan	35%
3	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP2SDM	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BP2SDM yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP SMK Kehutanan Negeri Samarinda	3,4 poin
4		Meningktanya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efesien di lingkup BP2SDM	Nilai SAKIP SMK Kehutanan Negeri Samarinda	74 poin

A.5 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda periode Semester I Tahun Anggaram 2026 ini merupakan laporan keuangan melalui SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAN V2 adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.6 BASIS AKUNTANSI

Basis
 Akuntansi

Satuan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas dan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.7 DASAR PENGUKURAN

Dasar
 Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan
 Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Satuan Kerja Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam necara pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan Upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam Batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi Dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan dan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/ Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2019. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada

Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurangan ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, di dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di budang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset tetap

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset Kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:81/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan

operasional entitas. disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.9 KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.10 EKUITAS

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.11 KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2026

Kebijakan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Tahun 2026

1. Catatan atas Laporan Keuangan mengikuti ilustrasi pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
2. Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun menggunakan Aplikasi SAKTI dan MyIntress. Output Laporan Keuangan pada tingkat Eselon I berasal dari unduhan aplikasi SAKTI dengan data yang terbuku sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.
3. Komponen Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) serta dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
4. Perbandingan saldo LRA, LO, LPE dan Neraca per 30 Juni 2026 adalah dengan saldo 30 Juni 2025 pada aplikasi SAKTI.
5. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 didasarkan pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-154/PB/2026 tanggal 3 Juli 2026 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda memperoleh alokasi anggaran Tahun anggaran 2026 sebesar Rp20.631.553.000,00. Selama periode Januari s.d Juni 2026, telah dilakukan revisi atas DIPA sebanyak 3 (tiga) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Revisi ke 1 tanggal 19 Desember 2025 dilakukan atas dasar Surat Kepala BP2SDM S.111/P2SDM/PEHKT/REN.03.11/B/12/2025 hal Usulan Revisi Anggaran.
- 2) Revisi ke 2 tanggal 18 Desember 2025 dilakukan atas dasar M.41/P2SDM/PEHKT/REN.03.11/12/2025 hal Revisi Anggaran terkait dukungan pelaksanaan prioritas direktif presiden tahun 2026.
- 3) Revisi ke 3 tanggal 12 April 2026 dilakukan atas dasar revisi memorandum Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor M.6/P2SDM/SP2SDM/REN.03.11/B/04/2026 tentang Revisi Penajaman Anggaran lingkup Badan P2SDM TA 2026.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	28.704.000	28.704.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	28.704.000	28.704.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.032.263.000	6.032.263.000
Belanja Barang	15.088.083.000	13.611.717.000
Belanja Modal	1.000.000.000	987.573.000
Jumlah Belanja	22.120.346.000	20.631.553.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp106.431.825,00

Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 106.431.825,00 atau mencapai 371 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 28.704.000,00. Pendapatan Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda terdiri dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp 27.295.482,00, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 8.106.700,00, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 47.029.643,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu sebesar Rp. 24.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2026		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	8.106.700	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Pend. dari Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai dg Tusi	28.704.000	27.295.482	95
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	47.029.643	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	24.000.000	#DIV/0!
Jumlah	28.704.000	106.431.825	371

- Pendapatan dari penjualan peralatan mesin dan monografi sebesar Rp 8.106.700,00
- Pendapatan dari sewa rumah dinas pegawai yang dipotong langsung dari gaji pegawai setiap bulan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2025, berikut daftar nama pegawai ;
 1. Pendik Afrian Ferdianto (558.360)
 2. Elyya Novamalaisari (558.360)
 3. Reny Supraba Irwan (261.492)
 4. Rajamuddin (261.492)
 5. Martina (261.492)
 6. Dwi Sri Wahyuni (261.492)
 7. Desy Riviana (261.492)
 8. Rinda Puji Rahayu (261.492)
 9. Ahmad Supriyadi (261.492)
 10. Samsul Arifin (201.722)
 11. Johan Wahudi (186.780)
 12. Denny Kusnandar (186.780)
 13. Kristo Lumiyus (186.780)
 14. Nurmini Hasyim (186.780)
 15. Nasib Mulyono (186.780)
 16. Tatang Suhendra (186.780)
 17. Aziz Lutfi (186.780)
 18. Aliansyah (149.424)
 19. Aminah Rohimah (134.482)
 20. Devi Nurmala (134.482)

21. Muhammad Chandi Harisma (134.482)
22. Catur Winanti (134.482)
23. Sukarno (134.482)
24. Miskat (134.482)
25. Rahmat Andriansyah (134.482)
- Pengembalian kekurangan sewa rumah dinas tahun 2025 Rp. 46,130,971,00 dan Pengembalian uang makan pegawai bulan desember 2025 Rp. 898,672,00.
 - Pengembalian biaya pengurusan KITAS siswa Timor Leste sebesar Rp 24.000.000,00.

Perbandingan Realisasi Pendapatan sampai dengan
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.106.700	-
425151	Pend. Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai dengan Tusi	27.295.482	14.352.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	47.029.643	2.218.248
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	24.000.000	
Jumlah		106.431.825	16.570.248

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp 9.885.321.475,00

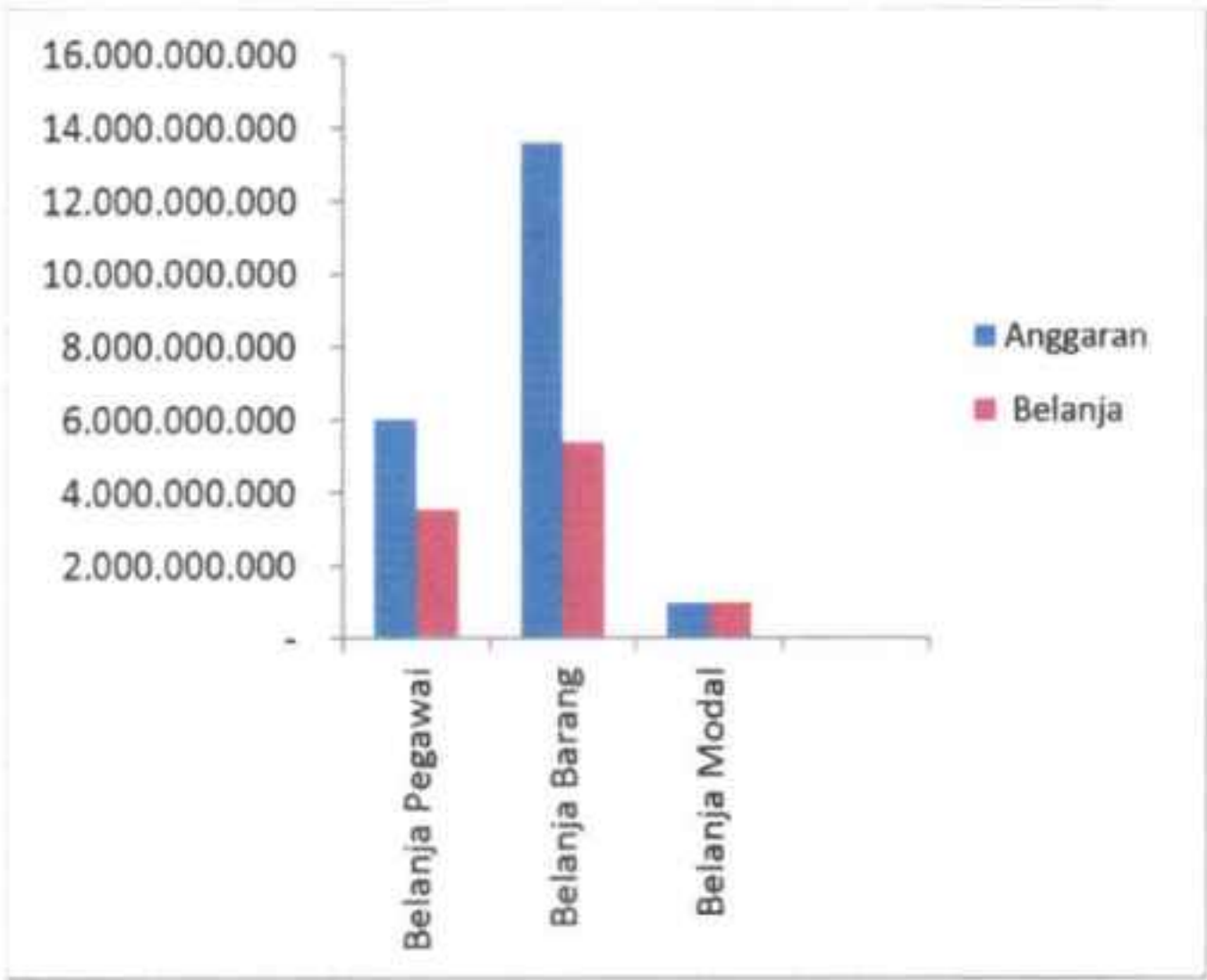
Realisasi Belanja instansi sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 9.885.321.475,00 atau 48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp20.631.553.000,00. Yaitu dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 3.517.257.482,00 atau 58 persen, Belanja Barang sebesar Rp 5.380.699.196,00 atau 40 persen dan Belanja Modal sebesar Rp 987.364.797,00 atau 40 persen. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

30 Juni 2026

Uraian	30 JUNI 2026		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.032.263.000	3.517.257.482	58,31
Belanja Barang	13.611.717.000	5.380.699.196	39,53
Belanja Modal	987.573.000	987.364.797	99,98
Total Belanja Kotor	20.631.553.000	9.885.321.475	47,91
Pengembalian		-	-
Jumlah	20.631.553.000	9.885.321.475	47,91

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan 30 Juni 2025, realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan (67,60.00) persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 orang dan adanya kenaikan jabatan ahli madya sebanyak 6 orang.

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.517.257.482,00	2.860.083.476,00	81,3%
Belanja Barang	5.380.699.196,00	3.822.327.229,00	71,0%
Belanja Modal	987.364.797,00	0,00	0,0%
Jumlah	9.885.321.475,00	6.682.410.705,00	67,60%
Pengembalian	0,00	0,00	0
Jumlah Netto	9.885.321.475,00	6.682.410.705,00	67,60%

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp3.517.257.482,
00

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 3.517.257.482,00 dan Rp 2.860.083.476,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2026 mengalami kenaikan dikarenakan adanya kenaikan jenjang Ahli Madya sebanyak 6 orang atas nama 1. Mukhamad Ari Hidayanto, S.Hut., 2. Elyya Novamalaisari, S.Hut., M.P., 3. Reny Supraba Irwan, S.Hut., M.P., 4. Samsul Arifin, S.Hut., 5. Kristo Lumiyus, S.P., 6. Desy Riviana, S.Hut dan penambahan pegawai sebanyak 10 orang PPPK atas nama 1. Ahmad Supriyadi, S.Hut., 2. Rini Rifayani, 3. Julius Siagian, 4. Fahrurazi, 5. Y. Agung Widodo, 6. Idham, 7. Syahrudin, 8. M. Ali, 9. Effendi, 10. Ipinu Wardani..

Perbandingan Belanja Pegawai
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2026	REALISASI 30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	858.434.620,00	856.045.560,00	100%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.900,00	9.702,00	89%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	72.256.110,00	72.698.230,00	101%
Belanja Tunjangan Anak PNS	22.318.404,00	22.163.302,00	99%
Belanja Tunj. Struktural PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	100%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	53.952.000,00	51.247.000,00	95%
Belanja Tunj. PPH PNS	12.384.646,00	11.781.218,00	95%
Belanja Tunj. Beras PNS	47.797.200,00	49.173.180,00	103%
Belanja Uang makan PNS	87.589.000,00	87.580.000,00	100%
Belanja Tunj. Umum PNS	10.320.000,00	11.430.000,00	111%
Belanja Tunj. Khusus Pegawai	1.238.013.720,00	1.036.166.648,00	84%
Belanja Gaji Pokok PPPK	436.755.196,00	249.198.131,00	57%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.309,00	4.497,00	54%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	26.102.926,00	17.533.708,00	67%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	6.674.011,00	3.457.486,00	52%
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	34.897.000,00	36.157.333,00	104%
Belanja Tunj. Beras PPPK	26.578.140,00	13.814.115,00	52%
Belanja Uang makan PPPK	66.091.000,00	31.789.000,00	48%
Belanja Tunj. Umum PPPK	13.883.326,00	0,00	0%
Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0%
Belanja Uang Lembur PPPK	0,00	0,00	0%
Belanja Tunj. Khusus PPPK	498.871.435,00	305.514.366,00	61%
Jumlah Belanja Kotor (Bruto)	3.517.257.943,00	2.860.083.476,00	81%
Pengembalian Belanja	461,00	0,00	0%
Jumlah Belanja Bersih (Netto)	3.517.257.482,00	2.860.083.476,00	81%

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang

Rp

5.380.699.196,00

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 5.380.699.196,00 dan Rp 3.822.327.229,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2026 tidak mengalami penurunan atau kenaikan (0.00) persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur kelembagaan, telah dilakukan proses Likuidasi terhadap satuan kerja yang lama (451653) yang berada dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses ini merupakan bagian dari penyesuaian satuan kerja yang baru (693704) yang berada dibawah naungan Kementerian Kehutanan.

Perbandingan Belanja Barang
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2026	REALISASI 30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
RUPIAH MURNI			
Belanja Keperluan Perkantoran	281.457.136,00	281.600.020,00	100%
Belanja Bahan	438.465.400,00	158.256.700,00	36%
Belanja Honor Output Kegiatan	186.273.000,00	215.575.000,00	116%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	598.447.560,00	1.909.984.475,00	319%
Belanja Barang Operasional	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	94.408.550,00	31.842.000,00	34%
Belanja Sewa	152.808.000,00	0,00	0%
Belanja Jasa Profesi	107.780.000,00	64.680.000,00	60%
Belanja Jasa Lainnya	202.640.800,00	215.259.218,00	106%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	373.210.333,00	268.130.593,00	72%
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	20.325.000,00	36.375.000,00	179%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	278.000,00	298.000,00	107%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	34.410.000,00	33.050.000,00	96%
Belanja Langganan Listrik	146.121.521,00	128.462.992,00	88%
Belanja Langganan Telepon	734.963,00	10.369.114,00	1411%
Belanja Langganan Air	153.747.572,00	135.632.103,00	88%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133.137.000,00	228.823.000,00	172%
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	9.790.000,00	39%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.319.290,00	94.199.014,00	68%
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	332.698.571,00	0,00	0%
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1.959.436.500,00	0,00	0%
Jumlah Belanja Kotor (Bruto)	5.380.699.196,00	3.822.327.229,00	71%
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Belanja Bersih (Netto)	5.380.699.196,00	3.822.327.229,00	71%

- Belanja barang merupakan pembelian yang terdiri dari:
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa operasional PPDB, Operasional UKK TRR, PHH dan Pembuatan Peta GIS, Operasional wisuda/inagurasi pelepasan siswa tahun 2026, operasional unit produksi, kasur asrama, bantal asrama, bak mandi siswa, Operasional Pengelolaan Perpustakaan, Operasional Pengelolaan komputer, operasional adiwiyata, operasional kegiatan pramuka, operasional kesiswaan, operasional BK, Biaya Paket kegiatan rapat/pertemuan half Day di luar kantor - Pejabat Eselon I & II (Kalimantan Timur), Snack Rapat Biasa Kalimantan Timur (53orangx2 kali), Makan Rapat Biasa Kalimantan Timur (49orangx1 kali), Penerbitan Advetorial, Snack Rapat Biasa Kalimantan Timur (6 orang x 6 kali), Makan Rapat Biasa Kalimantan Timur (6 orang x 6 kali), Snack Rapat Biasa Kalimantan Timur (49orangx1 kali), Makan Rapat Biasa Kalimantan Timur (49orangx1 kali), Operasional Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan, Biaya mengikuti seminar, workshop, lokakarya, Operasional Ektrakulikuler, Pakaian Seragam PNS dan PPPK, Pakaian Seragam rompi PNS dan PPPK;
 - Belanja peralatan dan mesin - ekstrakomptabel berupa mesin air, kursi aula, kipas angin, UPS, rak sepatu, kursi guru, lemari siswa, CCTV, dispenser, mesin las portable, toa universal speaker ZS-1030;

- Belanja sewa berupa sewa gedung pertemuan (Kalimantan Timur), sewa dekorasi panggung, taman panggung dan perlengkapan kursi ruang wisuda, sewa baju dayak (10 stelx 1 hari), sewa paket sound sistem, sewa videotron, sewa baju pesisir (10 stelx 1 hari), sewa baju pemusik, sewa aksesoris penari, sewa kipas angin (4 unitx 2 hari);
- Belanja jasa profesi berupa Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III), Honor Pengajar (273 JPL x 3 kelas), Honor Pembimbing Pengembangan Diri (112 JPL x 3 Kelas), honor pengajar, Honor Pembimbing Pengembangan Diri (104 JPL X 3 Kelas), Honor Pengajar (1 JPL x 3 kelas), Honor Pembimbing Pengembangan Diri (34 JPL X 3 Kelas);
- Belanja jasanya lainnya berupa jasa penyemprotan fogging di asrama, biaya kesehatan dalam rangka PPDB.

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal Rp
987.364.797,00

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 987.364.797,00 dan Rp 0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2025 kenaikan (100.00) persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pemblokiran pada belanja modal ditahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	987.364.797,00	0,00	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	100
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	100
Jumlah Belanja Kotor	987.364.797,00	0,00	100
Pengembalian	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja	987.364.797,00	0,00	100

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pembelian yang terdiri dari:

- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa Tab Pembelajaran sebesar Rp275.652.960,00 sesuai dengan sesuai SPK No PKS.110/SMKKN-III/TU/KAP.02.07/B/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 Penyedia/Pelaksana CV.WIWIT PRODUCTION;
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa GPS, Printer, AC Daikin 1 PK, Lemari Loker Avery 15 Pintu, Kulkas Sharp, Mesin Cuci Sharp dan TV sebesar Rp191.169.750,00 sesuai dengan nomor pesanan No EP-01KKAMXHQR7E5MS9KK2HPGZ782 tanggal 16 Maret 2026

Penyedia/Pelaksana CV. SOLUSI UTAMA NEGERI;

- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa Meja Resepsionis, meja kerja wakasek, meja kerja guru, lemari kayu, lemari kayu wakasek, meja kerja kayu sebesar Rp 385.070.587,00 sesuai SPK No PKS.102/SMKKN-III/TU/KAP.02.07/B/02/2026 tanggal 18 Februari 2026 Penyedia/Pelaksana PT. CITRA DATA NUSANTARA;
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa Loker Box Charger 16 Pintu, Springbed informa belgio mattres dan Dipan, sofa tamu infomra costa sebesar Rp 122.599.500,00 sesuai dengan nomor pesanan No EP-01KK8EN1D725KTE9HK2JMNVB4E tanggal 11 Maret 2026 Penyedia/Pelaksana CV. RIMBUN KOMPUTINDO.
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa AC Daikin 2 PK sebesar Rp12.872.000,00 sesuai dengan nomor SPM 00108A tanggal 22 Mei 2026.

B.2.4 Belanja Modal Pealatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan
Mesin Rp
987.364.797,0
0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 987.364.797,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2025 kenaikan (100.00) persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pemblokiran pada belanja modal ditahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN JENIS BELANJA	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	987.364.797,00	0,00	100
Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0
Pemasangan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Kotor	987.364.797,00	0,00	100
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja	987.364.797,00	0,00	100

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pembelian yang terdiri dari:

- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa Tab Pembelajaran sebesar Rp275.652.960,00 sesuai dengan sesuai SPK No PKS.110/SMKKN-III/TU/KAP.02.07/B/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 Penyedia/Pelaksana CV.WIWIT PRODUCTION;
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa GPS, Printer, AC Daikin 1 PK, Lemari Loker Avery 15 Pintu, Kulkas Sharp, Mesin Cuci Sharp dan TV sebesar Rp191.169.750,00 sesuai dengan nomor pesanan No EP-01KKAMXHQR7E5MS9KK2HPGZ782 tanggal 16 Maret 2026

Penyedia/Pelaksana CV. SOLUSI UTAMA NEGERI;

- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa Meja Resepsionis, meja kerja wakasek, meja kerja guru, lemari kayu, lemari kayu wakasek, meja kerja kayu sebesar Rp 385.070.587,00 sesuai SPK No PKS.102/SMKKN-III/TU/KAP.02.07/B/02/2026 tanggal 18 Februari 2026 Penyedia/Pelaksana PT. CITRA DATA NUSANTARA;
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa Loker Box Charger 16 Pintu, Springbed informa belgio mattres dan Dipan, sofa tamu infomra costa sebesar Rp 122.599.500,00 sesuai dengan nomor pesanan No EP-01KK8EN1D725KTE9HK2JMNVB4E tanggal 11 Maret 2026 Penyedia/Pelaksana CV. RIMBUN KOMPUTINDO.
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Berupa AC Daikin 2 PK sebesar Rp12.872.000,00 sesuai dengan nomor SPM 00108A tanggal 22 Mei 2026.

B.2.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN JENIS BELANJA	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0
Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0
Tugu/tanda batas	0,00	0,00	0
Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp
187.808.367,0
0

Nilai Aset Lancar pada SMK Negeri Samarinda per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 187.808.367,00 dan Rp 1.067.673,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar lingkup SMK Negeri Kehutanan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut ini:

Tabel 14. Rincian Aset Lancar
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	180.000.000,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	898.673,00	898.673,00
Piutang Bukan Pajak	5.323.194,00	0,00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	5.323.194,00	0,00
Persediaan	1.586.500,00	169.000,00
Jumlah	187.808.367,00	1.067.673,00

- Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) terdiri dari:
 - Belanja Tunjangan Kinerja PNS : Mukhammad Ari Hidayanto Rp208.514, Rajamuddin Rp104.257, Elyya Novamalaisari Rp104.257, Aziz Lutfi Rp164.112, Dini Yasmin Pattah Rp15.664
 - Belanja Tunjangan Kinerja PPPK : Isnan Ismail Akbar Rp22.976, Julius Siagian Rp37.313, Ahmad Supriyadi Rp19.580;
 - Belanja Uang Makan PNS : Tatang Suhendra Rp 111.000 dan Muhammad ChandiQ Harisma Rp 111.000
- Barang persediaan terdiri dari:
 - Kran Air 1/2 sebesar Rp 30.000
 - Lem Pipa sebesar Rp 70.000
 - Otomatis Pompa Air sebesar Rp 75.000
 - Shock Drat Dalam 1 2 sebesar Rp 10.500
 - L Drat dalam 1 2 sebesar Rp 14.000
 - Isolasi Swoth Hitam sebesar Rp 135.000
 - Saklar Seri sebesar Rp 100.000
 - Saklar Engkel sebesar Rp 80.000
 - T Shock 1 2 sebesar Rp 21.000
 - Anakan Kunci sebesar Rp 130.000
 - Kepala Lampu Tempel sebesar Rp 375.000
 - Kertas HVS A4 70 sebesar Rp 546.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp
180.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 180.000.000,00 dan Rp 0,00. UP Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	180.000.000,00	0,00
Jumlah	180.000.000,00	0,00

C.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak
Rp5.323.194,00

Saldo Piutang Bukan Pajak pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 5.323.194,00 dan Rp 0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Piutang Bukan Pajak	5.323.194,00	0,00
Jumlah	5.323.194,00	0,00

C.3 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp5.323.194,00

Piutang Bukan Pajak (Netto) adalah selisih saldo Piutang Bukan Pajak dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak. Piutang Bukan Pajak (Netto) pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 5.323.194,00 dan Rp 0,00.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto)
Per 30 Juni 2026 dan 30 juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Piutang Bukan Pajak (Netto)	5.323.194,00	0,00
Jumlah	5.323.194,00	0,00

C.4 Persediaan

Persediaan Rp
1.586.500,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 1.586.500,00 dan Rp 0,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Satuan Kerja. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Barang Konsumsi	1.586.500,00	169.000,00
Barang untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Jumlah	1.586.500,00	0,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Barang konsumsi terdiri dari:

- Kran Air 1/2 sebesar Rp 30.000
- Lem Pipa sebesar Rp 70.000
- Otomatis Pompa Air sebesar Rp 75.000
- Shock Drat Dalam 1 2 sebesar Rp 10.500
- L Drat dalam 1 2 sebesar Rp 14.000
- Isolasi Swoth Hitam sebesar Rp 135.000
- Saklar Seri sebesar Rp 100.000
- Saklar Engkel sebesar Rp 80.000
- T Shock 1 2 sebesar Rp 21.000
- Anakan Kunci sebesar Rp 130.000
- Kepala Lampu Tempel sebesar Rp 375.000
- Kertas HVS A4 70 sebesar Rp 546.000

C.5 Tanah

Tanah
Rp 0,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2026	0,00
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	0,00
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0,00
Saldo per 30 September 2025	0,00

C.6 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp14.140.010.
789,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 14.140.010.789,00 dan Rp 13.152.645.992,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	15.180.551.070,00
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	0,00
Pembelian	0,00
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	0,00
Saldo per 30 Juni 2026	14.140.010.789,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-10.625.924.599,00
Nilai Buku per 30 Juni 2026	3.514.086.190,00

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp
48.815.394.746,0
0

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 48.815.394.746,00 dan Rp 0,00 tidak terdapat mutasi tambah atau kurang atas aset tetap ini untuk per 30 Juni 2026. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0,00
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	0,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penghapusan	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Saldo per 30 Juni 2026	48.815.394.746,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	- 8.597.470.123,00
Nilai Buku per 30 Juni 2026	40.217.924.623,00

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp
50.402.000,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 senilai Rp 50.402.000,00 dan Rp 0,00. Tidak terdapat mutasi tambah atas aset tetap ini untuk per 30 Juni 2026. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0,00
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Transfer Masuk	0,00
Mutasi kurang:	
Revaluasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2026	50.402.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	- 11.578.836,00
Nilai Buku per 30 Juni 2026	38.823.164,00

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp
822,851,036,0
0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 822.851.036,00 dan Rp 0,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk per 30 Juni 2026. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0,00
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	0,00
Mutasi kurang:	
Penghentian penggunaan	0,00
Saldo per 30 Juni 2026	822.851.036,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-50.086.782,00
Nilai Buku per 30 Juni 2026	772.764.254,00

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp (19.285.060.340,00) dan Rp (0,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama

(19,285,060,340,00)

masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	14.140.010.789,00	10.625.924.599,00	3.514.086.190,00
2	Gedung dan Bangunan	48.815.394.746,00	8.597.470.123,00	40.217.924.623,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.402.000,00	11.578.836,00	38.823.164,00
4	Aset Tetap Lainnya	822.851.036,00	50.086.782,00	772.764.254,00
Akumulasi Penyusutan		63.828.658.571,00	19.285.060.340,00	44.543.598.231,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.12 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah bernilai sama sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penghentian penggunaan	0,00
Saldo per 30 Juni 2026	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	0,00
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp 0,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 0,00 dan Rp 1.001.702.479,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2025	0,00
Mutasi tambah:	
Penghentian Penggunaan BMN	0,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	0,00
Penggunaan Kembali BMN yg sdh dihentikan	0,00
Saldo per 30 Juni 2026	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0,00
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0,00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp 0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp (509.853.608,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.15 Kewajiban Jangka Pendek

C.15.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp
279.129.174,0
0

Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing – masing sebesar Rp 279.129.174,00 dan Rp 54.933.066,00. Utang Kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 279.129.174,00 terdiri dari Belanja 51 yang masih harus

dibayar sebesar Rp 196.958.368 dan Belanja 52 Yang masih harus dibayar berupa Pembayaran Honor operasional satuan kerja berdasarkan SPM 00133A sebesar Rp 7.290.000, Pembayaran Honor operasional satuan kerja berdasarkan SPM 00134A sebesar Rp 10.800.000, Pembayaran Honor operasional satuan kerja berdasarkan SPM 00135S sebesar Rp 6.000.000, Pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp 3.147.740, Belanja Yang masih harus dibayar berupa belanja langganan listrik Desember 2025 sebesar Rp 17.625.969,00, belanja langganan air Desember 2025 sebesar Rp 34.669.018,00, belanja langganan telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp 2.638.079,00.

C.15.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp33.600.000,
00

Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp 33.600,00 dan Rp 0,00. Utang yang belum ditagihkan berupa Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Outsourcing Tenaga Keamanan dan Petugas Kebersihan (7 orang x 12 bulan) yang diterbitkan SPM di bulan Juli dengan nomor SPM 00136A tanggal 1 Juli 2026.

C.15.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN Rp
180.000.000,0
0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp 180.000.000,00 dan Rp 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.16 Ekuitas

Ekuitas
Rp44.238.677.
424,00

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp44.238.677.424,00 dan Rp43.994.216.912,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp
32.618.676,00

Jumlah Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp32.618.676,00 dan Rp 16.744.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0,00	0,00	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	32.618.676,00	16.744.000,00	51,3%
Pendapatan Anggaran lain-lain	0,00	0,00	0
Jumlah	32.618.676,00	16.744.000,00	51,3%

- Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah dinas atas nama : Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai tusi atas sewa rumah dinas para pegawai SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang dipotong dari gaji pegawai setiap bulannya, berikut daftar nama pegawai ; 1. Pendik Afrian Ferdianto (558.360), 2. Elyya Novamalaisari (558.360), 3. Reny Supraba Irwan (261.492), 4. Rajamuddin (261.492), 5. Martina (261.492), 6. Dwi Sri Wahyuni (261.492), 7. Desy Riviana (261.492), 8. Rinda Puji Rahayu (261.492), 9. Ahmad Supriyadi (261.492), 10. Samsul Arifin (201.722), 11. Johan Wahudi (186.780), 12. Denny Kusnandar (186.780), 13. Kristo Lumiyus (186.780), 14. Nurmini Hasyim (186.780), 15. Nasib Mulyono (186.780), 16. Tatang Suhendra (186.780), 17. Aziz Lutfi (186.780), 18. Aliansyah (149.424), 19. Aminah Rohimah (134.482), 20. Devi Nurmala (134.482), 21. Muhammad ChandiQ Harisma (134.482), 22. Catur Winanti (134.482), 23. Sukarno (134.482), 24. Miskat (134.482) dan 25. Rahmat Andriansyah (134.482).

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp3.714.215.850,
00

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 3.714.215.850,00 dan Rp 3.033.650.371,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai sampai dengan 30 Juni 2026 dibandingkan dengan 30 Juni 2025, mengalami kenaikan (22.434) persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	959.785.420,00	962.981.420,00	100%
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.586,00	10.828,00	93%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	81.337.880,00	81.568.020,00	100%
Beban Tunj. Anak PNS	25.126.766,00	24.892.022,00	99%
Beban Tunj. Struktural PNS	4.860.000,00	4.860.000,00	100%
Beban Tunj. Fungsional PNS	60.283.000,00	57.922.000,00	96%
Beban Tunj. PPh PNS	12.469.749,00	11.931.880,00	96%
Beban Tunj. Beras PNS	53.663.220,00	55.184.040,00	103%
Beban Uang Makan PNS	87.589.000,00	87.580.000,00	100%
Beban Tunjangan Umum PNS	11.610.000,00	12.720.000,00	110%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan	1.238.013.720,00	1.036.166.648,00	84%
Beban Gaji Pokok PPPK	492.577.196,00	280.634.531,00	57%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	9.325,00	5.142,00	55%
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	29.514.196,00	19.741.748,00	67%
Beban Tunj. Anak PPPK	7.553.731,00	3.892.198,00	52%
Beban Tunj. Fungsional PPPK	38.951.000,00	40.704.333,00	105%
Beban Tunj. Beras PPPK	30.054.300,00	15.552.195,00	52%
Beban Uang Makan PPPK	66.091.000,00	31.789.000,00	48%
Beban Tunjangan Umum PPPK	15.843.326,00	0,00	0%
Beban Uang Lembur	0,00	0,00	#DIV/0!
Beban Uang Lembur PPPK	0,00	0,00	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan	498.871.435,00	305.514.366,00	61%
Jumlah	3.714.215.850,00	3.033.650.371,00	81,7%

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Beban Pegawai Menurut LO dan LRA

Perbandingan Realisasi Beban Pegawai per 30 Juni 2026
Menurut LO dan LRA

Uraian	Menurut		Selisih
	LO	LRA	
Beban/Belanja/Belanja Gaji Pokok PNS	959.785.420,00	858.434.620,00	101.350.800,00
Beban/Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.586,00	10.900,00	686,00
Beban/Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	81.337.880,00	72.256.110,00	9.081.770,00
Beban/Belanja Tunj. Anak PNS	25.126.766,00	22.318.404,00	2.808.362,00
Beban/Belanja Tunj. Struktural PNS	4.860.000,00	4.320.000,00	540.000,00
Beban/Belanja Tunj. Fungsional PNS	60.283.000,00	53.952.000,00	6.331.000,00
Beban/Belanja Tunj. PPh PNS	12.469.749,00	12.384.646,00	85.103,00
Beban/Belanja Tunj. Beras PNS	53.663.220,00	47.797.200,00	5.866.020,00
Beban/Belanja Uang Makan PNS	87.589.000,00	87.589.000,00	0,00
Beban/Belanja Tunjangan Umum PNS	11.610.000,00	10.320.000,00	1.290.000,00
Beban/Belanja Gaji Pokok PPPK	492.577.196,00	436.755.196,00	55.822.000,00
Beban/Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.325,00	8.309,00	1.016,00
Beban/Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	29.514.196,00	26.102.926,00	3.411.270,00
Beban/Belanja Tunjangan Anak PPPK	7.553.731,00	6.674.011,00	879.720,00
Beban/Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	38.951.000,00	34.897.000,00	4.054.000,00
Beban/Belanja Tunjangan Beras PPPK	30.054.300,00	26.578.140,00	3.476.160,00
Beban/Belanja Uang Makan PPPK	66.091.000,00	66.091.000,00	0,00
Beban/Belanja Tunjangan Umum PPPK	15.843.326,00	13.883.326,00	1.960.000,00
Beban/Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
Beban/Belanja Uang Lembur PPPK	0,00	0,00	0,00
Beban/Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.238.013.720,00	1.238.013.720,00	0,00
Beban/Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	498.871.435,00	498.871.435,00	0,00
Beban/Belanja Pengembalian Pembulatan Gaji PNS	0,00	461,00	461,00
Jumlah	3.714.215.850,00	3.517.257.482,00	196.958.368,00

- Terjadi selisih belanja pegawai sebesar Rp. 196.958.368,00 dikarenakan adanya pembayaran belanja pegawai di bulan Juli 2026.

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan Rp
117.991.050,00

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 117.991.050,00 dan Rp 42.060.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
30 Juni 206 dan 30 Juni 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	117.991.050,00	42.060.500,00	35,6%
Jumlah Beban Persediaan	117.991.050,00	42.060.500,00	35,6%

Terjadi selisih antara Beban Persediaan pada LO dengan Realisasi Belanja Persediaan pada LRA per 30 Juni 2026.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Beban Persediaan Menurut LO dan LRA
Perbandingan Realisasi Beban Persediaan per 30 Juni 2026
Menurut LO dan LRA

Uraian	Menurut		Selisih
	LO	LRA	
Beban/Belanja Persediaan konsumsi	117.991.050,00	94.408.550,00	23.582.500,00
Beban/Belanja persediaan lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	117.991.050,00	94.408.550,00	23.582.500,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa Rp
4.656.136.763,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 4.656.136.763,00 dan Rp 3.465.272.502,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	318.204.876,00	318.534.400,00	100%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	278.000,00	298.000,00	107%
Beban Honor Operasional Satker	41.700.000,00	33.050.000,00	79%
Beban Bahan	438.465.400,00	158.256.700,00	36%
Beban Honor Output Kegiatan	203.073.000,00	215.575.000,00	106%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	598.447.560,00	2.185.154.975,00	365%
Beban Langganan Listrik	146.121.521,00	128.462.992,00	88%
Beban Langganan Telepon	734.963,00	10.369.114,00	1411%
Beban Langganan Air	153.747.572,00	135.632.103,00	88%
Beban Sewa	152.808.000,00	0,00	0%
Beban Jasa Profesi	107.780.000,00	64.680.000,00	60%
Beban Jasa Lainnya	202.640.800,00	215.259.218,00	106%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	332.698.571,00	0,00	0%
Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.959.436.500,00	0,00	0%

Terjadi selisih pada beban belanja keperluan kantor sebesar Rp 36.747.740,00 berupa pembayaran Outsourcing Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan (7 orangx 12 bulan) sebesar 33.600.000,00 dan PPPK Paruh Waktu sebesar Rp. 3.147.740,00. Beban honor operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola keuangan sebesar Rp 7.290.000,00 dan belanja honor output kegiatan berupa honor Pembina kesiswaan eksternal sebesar Rp 16.800.000,00.

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Beban Barang dan Jasa Menurut LO dan LRA

Perbandingan Realisasi Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026

Menurut LO dan LRA

Uraian	Menurut		Selisih
	LO	LRA	
Beban/Belanja Keperluan Perkantoran	318.204.876,00	281.457.136,00	36.747.740,00
Beban/Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	278.000,00	278.000,00	0,00
Beban/Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	41.700.000,00	34.410.000,00	7.290.000,00
Beban/Belanja Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban/Belanja Bahan	438.465.400,00	438.465.400,00	0,00
Beban/Belanja Honor Output Kegiatan	203.073.000,00	186.273.000,00	16.800.000,00
Beban/Belanja Barang Non Operasional Lainnya	598.447.560,00	598.447.560,00	0,00
Beban/Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	332.698.571,00	332.698.571,00	0,00
Beban/Belanja Langganan Listrik	146.121.521,00	146.121.521,00	0,00
Beban/Belanja Langganan Telepon	734.963,00	734.963,00	0,00
Beban/Belanja Langganan Air	153.747.572,00	153.747.572,00	0,00
Beban/Belanja Sewa	152.808.000,00	152.808.000,00	0,00
Beban/Belanja Jasa Profesi	107.780.000,00	107.780.000,00	0,00
Beban/Belanja Jasa Lainnya	202.640.800,00	202.640.800,00	0,00
Beban/Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1.959.436.500,00	1.959.436.500,00	0,00
Jumlah	4.656.136.763,00	4.595.299.023,00	60.837.740,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan Rp
272.456.290,00

Beban Pemeliharaan sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 272.456.290,00 dan Rp 370.355.779,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 206	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133.137.000,00	232.823.000,00	174,9%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.319.290,00	137.532.779,00	98,7%
Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0
Jumlah	272.456.290,00	370.355.779,00	135,9%

Terjadi selisih antara Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada LO dengan Realisasi Belanja Persediaan pada LRA per 31 Desember 2025 : Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Jaringan listrik, telepon, LAN dan PAM.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Beban Pemeliharaan Menurut LO dan LRA

Perbandingan Realisasi Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026

Menurut LO dan LRA

Uraian	Menurut		Selisih
	LO	LRA	
Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133.137.000,00	133.137.000,00	0,00
Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.319.290,00	139.319.290,00	0,00
Beban/Belanja Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
Beban/Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
Beban/Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban/Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Beban/Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	272.456.290,00	297.456.290,00	-25.000.000,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 373.210.333,00 dan Rp 292.680.929,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Beban

Perjalanan Dinas

Rp

373.210.333,00

Rincian Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	372.210.333,00	292.680.929,00	78,6%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.325.000,00	36.375.000,00	179,0%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	#DIV/0!
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah	392.535.333,00	329.055.929,00	83,8%

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Beban Perjalanan Dinas Menurut LO dan LRA
Perbandingan Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026
Menurut LO dan LRA

Uraian	Menurut		Selisih
	LO	LRA	
Beban Perjalanan Dinas Biasa	373.210.333,00	373.210.333,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.325.000,00	20.325.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Jumlah	393.535.333,00	393.535.333,00	0,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp
1.178.489.308,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.105.735.259,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	610.144.274,00	537.410.225,00	88,1%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	560.508.672,00	560.508.672,00	100,0%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	681.108,00	681.108,00	100,0%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.155.254,00	7.155.254,00	100,0%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam opsional pemerintah	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	1.178.489.308,00	1.105.755.259,00	93,8%
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	0,00	0,00	#DIV/0!

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang - Lancar	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang - Non Lancar	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp
71.029.643,00

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 71.029.643,00 dan Rp 2.136.533,00. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	47.029.643,00	0,00	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	24.000.000,00	2.136.533,00	100
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	0
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	0,00	0,00	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	71.029.643,00	2.136.533,00	100

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp43.994.216.912,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 1 Januari 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 43.994.216.912,00 dan Rp 0,00. Tidak terdapat ekuitas awal karena merupakan satuan kerja baru pada tahun 2025 atas pembentukan Kabinet Merah Putih, sehingga semua asset yang dimiliki merupakan transfer masuk dari satuan kerja sebelumnya/Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO

Rp (10.713.817.119,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp (10.713.817.119,00) dan Rp (8.327.269.807,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Penyesuaian nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat peneapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,00

Koreksi Nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalah dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat transaksi Koreksi Nilai Persediaan per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih

Revaluasi Aset

Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Terdapat Selisih revaluasi Aset tetap per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung, dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi

Rp0,00

Koreksi pencatatan aset tetap per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda per 30 Juni 2026 terdapat koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Tidak terdapat transaksi Koreksi Lain-lain per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp
9.778.889.650

Nilai Transaksi Antar Entitas per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 9.778.889.650,00 dan Rp 52.515.461.168,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Diterima dari Entitas Lain	106.431.825	16.570.248,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.885.321.475	6.682.410.705,00
Transfer keluar		0,00
Transfer masuk		45.849.620.711,00
Jumlah	9.778.889.650,00	52.515.461.168,00

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 30 Juni 2026, DDEL sebesar Rp 106.431.825,00 sedangkan DKEL sebesar Rp9.885.321.475,00.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp43.059.289.443,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 43.059.289.443,00 dan Rp 44.188.191.361,00.

F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1 PENGUNGKAPAN DAMPAK PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH DAN KEBERLANJUTAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN

Pengungkapan Lain - Lain

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu Kementerian yang terdampak dan mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2025 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2025-2029 dan Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2025 Tentang Organisasi Kementerian Negara oleh Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2025-2029.
2. Dampak Pembentukan Kabinet Merah Putih mengakibatkan Pemisahan Kementerian pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dasar hukum pembentukan Kementerian Kehutanan yaitu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 175 Tahun 2014 tentang Kementerian Kehutanan.
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, tugas Kementerian Kehutanan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara.
4. Terjadinya perubahan kode Satuan Kerja yang semula adalah 451653 menjadi 693704 yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda.
5. Akibat dari likuidasi tersebut, pada tahun 2024 Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda (693704) tidak mempunyai saldo pada tahun 2024 baik Semester I maupun periode Desember 2024
- Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut:
 1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan Kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan Lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
 2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan Kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan; dan
 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 6. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia

kehutanan;

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
9. Adanya perubahan penggunaan akun PNBPN penerimaan pembayaran sewa rumah dinas/negara yang sebelumnya menggunakan kodefikasi segmen akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) diubah dengan menggunakan kodefikasi segmen akun 425151 (Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi) sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025 sebagaimana ditindaklanjuti dengan terbitnya Nota Dinas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor ND.214/SP2SDM/KSDMOTL/KEU.06.01/B/2025 tanggal 6 Mei 2025. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya estimasi PNBPN pada RKAKL atas akun 425131 yang telah disusun pada tahun 2024. Sebagai catatan tambahan penerimaan pendapatan sewa rumah dinas pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda dari bulan Januari s/d April 2025 masih menggunakan akun 425131 karena pengajuan gaji Induk Bulan April (di dalamnya termasuk potongan sewa rumah dinas) sudah diajukan ke KPPN tanggal 5 Maret 2025.

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kehutanan
Unit Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Satuan Kerja : SMK Kehutanan Negeri Samarinda

KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN_RO	SATUAN	BELANJA		KELUARAN		KETERANGAN		
					PAGU_BELANJA	REALISASI BELANJA	Persen Realisasi	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	KETERANGAN
7320	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	7.782.477.000	4.451.971.975	57,21%	1	1	61,56%	Progress sampai dengan bulan Juni sebesar 61,56%
7320	EBA	956	Layanan BMN	Layanan	2.000.000	2.000.000	100%	1	1	100%	Progress sampai dengan bulan Juni sebesar 100%
7298	SAE	001	Peserta didik SMK bidang kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	12.847.076.000	5.431.349.961	42,28%	104	102	51,46%	Progress sampai dengan bulan Juni sebesar 51,46%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KPPN SAMARINDA

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693704 - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 24/07/26 8:35
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	20,631,553,000	20,631,553,000	0
2	Belanja	9,885,321,936	9,885,321,936	0
3	Pengembalian Belanja	-461	-461	0
4	Estimasi Pendapatan	28,704,000	28,704,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	106,431,825	106,431,825	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	180,000,000	180,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	180,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18 Juli 2026



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
ESELON I : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/26 9:40 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:49 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	32,618,676	16,744,000	15,874,676	94.808
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	32,618,676	16,744,000	15,874,676	94.808
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	32,618,676	16,744,000	15,874,676	94.808
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,715,114,523	3,033,650,371	681,464,152	22.464
Beban Persediaan	117,991,050	42,060,500	75,930,550	180.527
Beban Barang dan Jasa	4,656,136,763	3,465,272,502	1,190,864,261	34.366
Beban Pemeliharaan	272,456,290	370,355,779	(97,899,489)	(26.434)
Beban Perjalanan Dinas	393,535,333	329,055,929	64,479,404	19.595
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
ESELON I : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN
NEGERI SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/26 9:40 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:49 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,178,489,308	1,105,755,259	72,734,049	6.578
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,333,723,267	8,346,150,340	1,987,572,927	23.814
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,301,104,591)	(8,329,406,340)	(1,971,698,251)	23.672
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(483,742,171)	0	(483,742,171)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	8,106,700	0	8,106,700	
Beban Pelepasan Aset	491,848,871	0	491,848,871	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71,029,643	2,136,533	68,893,110	3,224.5 28
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71,029,643	2,136,533	68,893,110	3,224.5 28
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(412,712,528)	2,136,533	(414,849,061)	(19,416. 927)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,713,817,119)	(8,327,269,807)	(2,386,547,312)	28.659
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,713,817,119)	(8,327,269,807)	(2,386,547,312)	28.659

Keterangan :
FINAL

Samarinda, 18 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

MUKHAMAD ARI HIDAYANTO
NIP 198302022009121003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA
Tgl Data : 18/07/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:49 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	43,994,216,912	0	43,994,216,912	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,713,817,119)	(8,327,269,807)	(2,386,547,312)	28.66
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,778,889,650	52,515,461,168	(42,736,571,518)	(81.38)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(934,927,469)	44,188,191,361	(45,123,118,830)	(102.12)
EKUITAS AKHIR	43,059,289,443	44,188,191,361	(1,128,901,918)	(2.55)

Keterangan :
FINAL

Samarinda, 18 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA
MUKHAMAD ARI HIDAYANTO
NIP.198302022009121003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN 143
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11
SATUAN KERJA : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA 693704

Tgl Data : 18/07/26 9:40 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:49 PM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,704,000	106,431,825	77,727,825	371	27,144,000	16,570,248	10,573,752	61
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dan Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	28,704,000	106,431,825	77,727,825	371	27,144,000	16,570,248	10,573,752	61
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	28,704,000	106,431,825	77,727,825	371	27,144,000	16,570,248	10,573,752	61
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	20,631,553,000	9,885,321,475	(10,746,231,525)	48	17,798,892,000	6,882,410,705	11,116,481,295	38
1. Belanja Pegawai	6,032,263,000	3,517,257,482	(2,515,005,518)	58	5,605,848,000	2,880,063,476	2,745,764,524	51
2. Belanja Barang	13,611,717,000	5,380,699,196	(8,231,017,804)	40	11,378,044,000	3,822,327,229	7,555,716,771	34
3. Belanja Modal	987,573,000	987,364,797	(208,203)	100	815,000,000	0	815,000,000	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN 143
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11
SATUAN KERJA : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA 693704

Tgl Data : 18/07/26 9:40 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:49 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	6	8	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	20,631,553,000	9,885,321,475	(10,746,231,525)	48	17,798,892,000	6,682,410,705	11,116,481,295	38
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 18 Juli 2026

Peranggung Jawab LIKPA

MUKHAMAD AN HIDAYANTO
NIP. 198302022009121003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/26 9:40 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:50 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	0	180,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	898,673	(898,673)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	5,323,194	0	5,323,194	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	5,323,194	0	5,323,194	0.00
Persediaan	1,586,500	169,000	1,417,500	838.76
JUMLAH ASET LANCAR	186,909,694	1,067,673	185,842,021	17,406.27
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	14,140,010,789	13,152,645,992	987,364,797	7.51
Gedung dan Bangunan	48,815,394,746	48,815,394,746	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50,402,000	50,402,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	822,851,036	822,851,036	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(20,463,549,648)	(19,285,060,340)	(1,178,489,308)	6.11
JUMLAH ASET TETAP	43,365,108,923	43,556,233,434	(191,124,511)	(0.44)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	1,001,702,479	(1,001,702,479)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(509,853,608)	509,853,608	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	491,848,871	(491,848,871)	(100.00)
JUMLAH ASET	43,552,018,617	44,049,149,978	(497,131,361)	(1.13)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	279,129,174	54,933,066	224,196,108	408.13
Utang Yang Belum Ditagihkan	33,600,000	0	33,600,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	180,000,000	0	180,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	492,729,174	54,933,066	437,796,108	796.96
JUMLAH KEWAJIBAN	492,729,174	54,933,066	437,796,108	796.96
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	43,059,289,443	43,994,216,912	(934,927,469)	(2.13)
JUMLAH EKUITAS	43,059,289,443	43,994,216,912	(934,927,469)	(2.13)
JUMLAH EKUITAS	43,059,289,443	43,994,216,912	(934,927,469)	(2.13)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	43,552,018,617	44,049,149,978	(497,131,361)	(1.13)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN
NEGERI SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/26 9:40 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:50 PM
Halaman : 2

Keterangan :
FINAL

lap_neraca_satker_komparatif_poc
Samarinda, 18 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

MUKHAMAD ARHIDAYANTO
NIP 198302022009121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA
Tgl Data : 18/07/26 9:40 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:50 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	5,323,194	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,586,500	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,140,010,789	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	48,815,394,746	0
0.0	134112	Irigasi	50,402,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	822,851,036	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,236,068,873
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,157,978,795
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	12,259,944
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	57,242,036
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	196,958,368
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	82,170,806
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	33,600,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	180,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,885,321,475
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	106,431,825	0
0.0	391111	Ekuitas	0	43,994,216,912
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,106,700
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	32,618,676
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47,029,643
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	24,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	959,785,420	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,586	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	81,337,880	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	25,126,766	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,860,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	60,283,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	12,469,749	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	53,663,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	87,811,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,610,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	492,577,196	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	9,325	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,514,196	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	7,553,731	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	38,951,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA
Tgl Data : 18/07/26 9:40 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:50 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	30,054,300	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	66,091,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	15,843,326	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,238,610,524	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	498,951,304	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	318,204,876	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1,959,436,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	278,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41,700,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	438,465,400	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	203,073,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	598,447,560	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	332,698,571	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	146,121,521	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	734,963	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	153,747,572	0
3.0	522141	Beban Sewa	152,808,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	107,780,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	202,640,800	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133,137,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139,319,290	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	373,210,333	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,325,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	610,144,274	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	560,508,672	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	681,108	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7,155,254	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	117,991,050	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	491,848,871	0
JUMLAH			74,947,572,228	74,947,572,228

Keterangan :
FINAL
Samarinda, 18 Juli 2026
Peranggung Jawab UAKPA
MUKHAMAD ARI HIDAYANTO
NIP 198302022009121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 18/07/26 12:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	9,885,321,475
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	106,431,825	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,106,700
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	27,295,482
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47,029,643
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	24,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	858,434,620	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,900	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	72,256,110	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,318,404	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,320,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	53,952,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,384,646	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	47,797,200	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	87,589,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,320,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	436,755,196	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,309	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	26,102,926	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,674,011	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	34,897,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	26,578,140	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	66,091,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	13,883,326	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,238,013,720	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	498,871,435	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	281,457,136	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1,959,436,500	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	278,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	34,410,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	438,465,400	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	186,273,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	598,447,560	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	332,698,571	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	94,408,550	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	146,121,521	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	734,963	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (693704) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 18/07/26 12:50 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Belanja Langganan Air	153,747,572	0
3.0	522141	Belanja Sewa	152,808,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	107,780,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	202,640,800	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133,137,000	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139,319,290	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	373,210,333	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,325,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	987,364,797	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	461
JUMLAH			9,991,753,761	9,991,753,761

Keterangan :
FINAL

Samarinda, 18 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

MUKHAMAD ARI HIDAYANTO
198302022009121003

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TAHUN 2026

Kode dan Nama UAKPA : (693704) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda
Kode dan Nama UAPPAW : (1600) Kalimantan Timur
Kode dan Nama Eselon-1 : (11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kode dan Nama K/L : (143) Kementerian Kehutanan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan normalisasi dan tidak lanjut normalisasi (dalam normalisasi terdapat pemotif)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat ketidaksesuaian Akun vs Kode barang Persediaan per tanggal pelaporan (jika ada, uraikan dalam lampiran telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun vs Kode barang Aset, tetapi TM per tanggal pelaporan (jika ada, uraikan dalam lampiran telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan belum diterima mutasi per tanggal pelaporan dan belum dilakukan Penjualan Rutan		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
a.	Pagu/DIPA		√	Tidak

	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah Saldo tidak normal? (jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal, dan status salaknya)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun "belum diregister")		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECHEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 111xxxx hingga 113xxx (Kas Belanja Kas yang boleh ada dan K hanya Akun dan		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114710-4000 Belanja Pembiayaan bunga pinjaman modal subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425143/425144/425161/425162/425719/425745/425772/425773/425774/425815/425816/425998		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun/akun yang seharusnya tidak ada pada LK Yus. (misalnya persediaan Amortasi		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak

3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat semua transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monev dan Laporan, Belanja Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tupoksi misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rekening koran, rekening koran, rekening koran ?		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi penerimaan hibah langsung yang barangnya jika ada agar dilanjutkan ke			Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan, akun 218211 lainnya boleh muncul			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111627 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monev dan Laporan, Belanja Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada MONSAKTI, tetap periode berjalan adakah jumlah transfer pada SLD, untuk mengecek 425913, KLR, dan KLR			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (bukan karena salah pin menu dalam aplikasi atau salah kode akun akun 491429)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dan KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BCO = BAR Rekon = LPJ (modul bendahara), apakah benar, maka pastikan	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx),		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	bandingkan dengan laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya/Tidak
3	terdapat akun "Jenis Revaluasi Aset", "Bila ada, cek apakah benar dari koreksi/penyisihan dan Realisasi? Apakah benar ada ID		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh: Pengungkapan dari 100 senilai Rp 121.000.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal	√		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun akhir dari semua transaksi antar entitas Contoh: 42101111 343111 343211 343311 343411 343511 343611 343711 343811 343911	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk penanganan Pandemi Covid-19? (Wengikut)		√	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat pengeluaran belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah dimasukkan ke dalam rekening untuk Belanja Dana Pandemi Covid-19?			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak Ya/Tidak

3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		√	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX.			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX.			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Dwi Sri Wahyuni, S.Sos.
NIP 198907132023212041



Alifiah Nurusadiah, S.E.
NIP 198503122015022001